



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 10 /TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN 2024

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perencanaan penyusunan peraturan bupati, maka perlu disusun Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah dan peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2024

BUPATI PEMALANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR: 188.4/ 10 / TAHUN 2024
 TENTANG PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN
 PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

PROGRAM PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI TAHUN 2024

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
1.	Pemberdayaan Desa Wisata	Baru	Disparpora
2.	Rencana Aksi Daerah Pangarusutamaan Gender	Baru	Dinsos KB PP
3.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Ubah	Dinkes
4.	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Baru	Dinkes
5.	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Baru	Dinkes
6.	Pedoman Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Baru	Dinkes
7.	Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Baru	Dinkes
8.	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Pemalang	Baru	Dinkes

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
9.	Rumah Sakit Kabupaten Pemalang Sebagai Rumah Sakit Pusat Pelayanan <i>Obsterti Neonatal Emergency Komprehensif</i>	Ubah	Dinkes
10.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Yang Bersifat Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang	Ubah	Dinpermasdes
11.	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Baru	Dinpermasdes
12.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa	Baru	Dinpermasdes
13.	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025	Baru	Dinpermasdes
14.	Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025	Baru	Dinpermasdes
15.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Baru	Dinpermasdes
16.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mendelem Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
17.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Beluk Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
18.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Belik Kecamatan. Belik	Baru	Dinpermasdes
19.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bulakan Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
20.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunungjaya Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
21.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Gunungtiga Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
22.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kuta Kecamatan Belik	Baru	Dinpermasdes
23.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal	Baru	Dinpermasdes
24.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Warungpring Kecamatan Warungpring	Baru	Dinpermasdes
25.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Siremeng Kecamatan Pulosari	Baru	Dinpermasdes

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
26.	Penetapan dan Penegasan Batas Desa Penggarit Kecamatan Taman	Baru	Dinpermasdes
27.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang tentang Produk Makanan Halal	Baru	Diskoperindag
28.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang	Ubah	DPMPTSP
29.	Penyelenggaraan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112	Baru	Diskominfo
30.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Pematang Tahun 2021-2028	Ubah	Diskominfo
31.	Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pematang	Baru	Diskominfo
32.	Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Kabupaten Pematang	Baru	Diskominfo
33.	Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Kabupaten Pematang Melalui Media Massa	Baru	Diskominfo
34.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah	Ubah	Disperkim
35.	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Kawasan Pusat Kota Pematang, Kelurahan Pelutan, Kecamatan Pematang	Baru	Disperkim
36.	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik	Baru	Disperkim
37.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ubah	Dishub
38.	Penyelenggaraan Parkir	Baru	Dishub

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
39.	Sistem Pertanian Organik	Baru	Dispertan
40.	Jadwal Retensi Arsip	Baru	Dinpusarda
41.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	Baru	Satpol PP
42.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025	Baru	Bappeda
43.	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025	Baru	Bappeda
44.	Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Pemalang	Baru	Bappeda
45.	Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Pemalang	Baru	Bapenda
46.	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025	Baru	BPKAD
47.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Baru	BPKAD
48.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Baru	BPKAD
49.	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024	Baru	BPKAD
50.	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023	Baru	BPKAD
51.	Perubahan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ubah	BPKAD
52.	Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	Baru	BPKAD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/ UBAH)	PEMRAKARSA
53.	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Baru	BPKAD
54.	Sistem Akuntansi Pemda	Ubah	BPKAD
55.	Belanja Tidak Terduga	Ubah	BPKAD
56.	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	Ubah	BPKAD
57.	Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil	Ubah	BKD
58.	Tambahannya Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Ubah	BKD
59.	Standar pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Ubah	BKD
60.	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Baru	BKD
61.	Pelimpahan Delegasi atau Mandat Kewenangan untuk Menandatangani Keputusan dan/atau Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian	Ubah	BKD
62.	Pedoman Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Baru	BKD
63.	Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil	Baru	BKD
64.	Pedoman penyampaian LHKPN Bagi Pejabat Negara/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Ubah	BKD
65.	Pedoman Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil, Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Ubah	BKD
66.	Pengembangan Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara	Baru	BKD
67.	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Baru	BKD

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/UBAH)	PEMRAKARSA
68.	Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang	Baru	Bagian Organisasi Setda
69.	Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pematang	Baru	Bagian Organisasi Setda
70.	<i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2023-2026	Baru	Bagian Organisasi Setda
71.	Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang	Baru	Bagian Organisasi Setda
72.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pematang	Baru	Bagian Hukum Setda
73.	Pedoman Penyusunan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati	Baru	Bagian Hukum Setda
74.	Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang	Baru	Bagian Hukum Setda
75.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kelompok Rentan	Baru	Bagian Hukum Setda
76.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2024	Ubah	Bagian Adpem Setda
77.	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2024	Ubah	Bagian Adpem Setda
78.	Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2025	Baru	Bagian Adpem Setda
79.	Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Tahun 2024	Ubah	Bagian Adpem Setda

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	STATUS (BARU/ UBAH)	PEMRAKARSA
80.	Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2025	Baru	Bagian Adpem Setda
81.	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2024	Ubah	Bagian Adpem Setda
82.	Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang	Baru	Disparpora

BUPATI PEMALANG,



MANSUR HIDAYAT